



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Arthur Simanjuntak

Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima September 2017

Disetujui November 2017

Dipublikasikan Desember 2017

Keywords:

Organizational behaviour factors; implementation of financial accounting use area; transparency and accountability.

Abstrak

The purpose of this study is to determine and analyze the effect of organizational behavior factors on the implementation of financial accounting system use area in realizing financial transparency and accountability. This research uses descriptive analysis techniques and multiple linear regression analysis and path analysis test. The results of the study show that there is an influence of organizational behavior factors (support superior, goal clarity, training and organizational commitment) on financial transparency and accountability. There is an influence of behavioral factors (support superior, goal clarity and training) on transparency and accountability through the implementation of financial accounting system use area. While organizational behavior factors (organizational commitment) directly influence transparency and accountability of regional finances.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan Perundang-Undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 yang pada dasarnya pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut di atas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelolaan keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Dalam upaya mencapai *good governance* dan *clean government*, pemerintah harus terus mengintensifkan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui berbagai Peraturan dan Undang-Undang, Pemerintah terus meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah menerjemahkan tanggung jawab atas keuangan yang dikelola dalam bentuk penyampaian laporan keuangan. Untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah membuat pusat pengembangan sistem informasi keuangan daerah

Pengembangan sistem memerlukan perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 2010).

Ada banyak organisasi internasional yang menetapkan prinsip *good governance* yang salah satunya adalah *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Berdasarkan penelitian dengan data yang dikumpulkan dari November 2015 hingga Juni 2016, menunjukkan bahwa: “Sekitar tiga perempat negara OECD telah mengadopsi akuntansi berbasis akrual untuk laporan keuangan akhir tahun mereka sebagai prioritas utama. Ini berarti bahwa pelaporan keuangan pemerintah lebih komprehensif, dengan tidak hanya pergerakan uang masuk dan keluar dari kas pemerintah dilaporkan

kepada publik, tetapi berbagai operasi keuangan lainnya, serta inventaris pemerintah, aset dan kewajiban” (OECD, IFAC, 2017, p. 4).

Penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan-perbedaan tersebut adalah populasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Labuhan Batu Utara (BPKAD Labuhan Batu Utara). Berdasarkan penjelasan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan *good governance*.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara prinsipal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976).

Teori Kontijensi (*Contingency Theory*)

Teori kontijensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi (Otley, 1980).

Kesesuaian (*fit*) yang lebih lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel kontijensi menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat. Berdasarkan pada *Contingency Theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, tergantung pada kondisi Pemerintah

Daerah yang bersangkutan.

Faktor Keperilakuan Organisasi

Faktor berperilaku organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004): Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. Penelitian ini menggunakan faktor berperilaku antara lain: Dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengertian Dukungan Atasan

Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. (Chenhall, 2004)

Pengertian Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi (Chenhall, 2004).

Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004)

Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor,

baik dari organisasi, maupun dari individu sendiri. Dalam perkembangannya, pengertian *affective commitment*, *continuance commitment*, dan *normative commitment*, masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri (Allen & Meyer, 1997).

Pengertian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

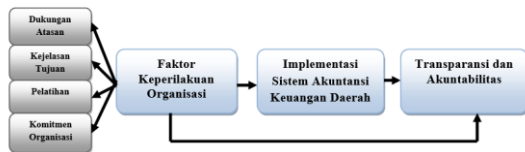
Adapun implementasi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk pengelolaan dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan item yang dikembangkan dengan memodifikasi instrumen yang digunakan oleh Chenhall (2004) dan disesuaikan dengan kegunaan sistem keuangan daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-Undangan.

Pengertian akuntabilitas menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Gambar model penelitiannya adalah seperti di bawah ini.



Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Ada pengaruh faktor berperilaku organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi) terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.
2. Ada pengaruh faktor berperilaku organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi) terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 42 responden. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh responden dari populasi yang berjumlah 42 orang.

Jenis Data yang digunakan penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber. Sumber data primer ini diperoleh dengan menjawab pertanyaan atau mengisi kuisisioner.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi

dokumentasi, dan kuesioner (Sugiyono, 2016).

Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari jurnal ilmiah dan buku, serta penelusuran Internet berkaitan dengan masalah yang teliti.

Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis untuk diisi oleh responden. Pengukuran dari variabel-variabel penelitian ini sendiri menggunakan skala Likert. Skala likert merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pengoperasionalan konsep (*concept operationalizing*) atau biasa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian (Erlina, 2011).

HASIL

Pada hasil uji statistik deskriptif menunjukkan deskripsi dari variabel penelitian yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Dalam penelitian ini menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian berdistribusi normal.

Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memiliki data set yang baik yang sangat penting untuk penelitian lanjutan. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas digunakan untuk

menentukan apakah suatu data set dimodelkan dengan baik, atau berdistribusi normal, dan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak yang mendasari data set akan terdistribusi secara normal. Distribusi empiris data harus berbentuk lonceng dan menyerupai distribusi normal.

Dari grafik Normal P-P Plot telah menunjukkan titik-titik penyebaran di sekitar garis diagonal, dan menyebar mengikuti arah garis diagonal. Ini berarti bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) < 10, maka disimpulkan variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi kriteria uji heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama penelitian ini adalah terdapat pengaruh faktor keperilakuan organisasi (Dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi) terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yaitu Uji signifikansi F, diperoleh bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 (5%) yaitu sebesar

(0,000). Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Jadi kesimpulan ada pengaruh faktor keperilakuan organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi) terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Hipotesis kedua penelitian ini adalah terdapat pengaruh faktor keperilakuan organisasi (Dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi) terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi sistem akuntansi keuangan daerah

Sistem dan prosedur keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa Pemerintah tersebut telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik terlihat dengan adanya dukungan atasan dan juga kejelasan tujuan organisasi yaitu terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

Terlihat juga dengan adanya pelatihan pegawai terhadap penggunaan software yang akan digunakan untuk Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 64 Tahun 2013, dan juga Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual yang menggunakan Software membuat akses terhadap laporan dan data keuangan menjadi lebih cepat dan transparan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil uji Path analisis, menunjukkan bahwa ada pengaruh faktor keperilakuan

(Dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan) terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan faktor keperilakuan organisasi (Komitmen organisasi) berpengaruh langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh faktor keperilakuan organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan komitmen organisasi) terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Selain itu, ada pengaruh faktor keperilakuan (Dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan) terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi sistem akuntansi keuangan Ddaerah, sedangkan faktor keperilakuan organisasi (Komitmen Organisasi) berpengaruh langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Saran Penelitian

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengambil populasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, agar dapat menjelaskan secara menyeluruh.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mencari variabel lain di luar dari peneliti uji, seperti Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, N.J., & Meyer, J.P. 1997. *Commitment in the Workplace. Theori, Reserach and Application*. Sage Publication.

Bodnar, George H. and William S. Hopwood, 2010. *Accounting Information System*. 10th Edition. United State Of America: Pearson Education Inc.

Chenhall, R.H. 2004. *The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management*. Behavioral Reaserch in Accounting 16:19.

Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian: Untuk Akuntansi*, USU PRESS, Medan.

Jensen MC, Meckling, W. 1976 . *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial and Economics. 3, pp: 305-360.

OECD. IFAC. 2017. *Accrual Practice and Reform Experiences in OECD Countries*. OECD Publishing. Paris: <http://dx.doi.prg/10.1787/9789264270572-en>: www.ifac.org/tags/ipsas.

Otley, D. T. 1980. *The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis*. The Journal of Accounting Organization and Society. Vol.5. pp 413-428.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendagri

Nomor71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.

Lampiran Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Dimensi/Indikator	Skala
1	Faktor Keperilakuan Organisasi (Chenhall, 2004) & (Allen & Meyer, 1997)	<p>Faktor berperilaku organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, dan Pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004):</p> <p>Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan,</p> <p>Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan</p> <p>Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. (Chenhall, 2004)</p> <p>Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, baik dari organisasi, maupun dari individu sendiri. Dalam perkembangannya affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment, masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri (Allen & Meyer, 1997).</p>	<p>Dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan Atasan Kejelasan Tujuan Pelatihan Komitmen Organisasi <p>Indikator Dukungan Atasan (Chenhall, 2004):</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang. Memberikan dukungan pada setiap keputusan. Melaksanakan pekerjaan dengan baik. Menghargai pendapat. Kebebasan dalam mendiskusikan masalah. Kepercayaan. Kebebasan dalam berpendapat. Perhatian. Menerima dukungan atasan. <p>Indikator Kejelasan Tujuan (Chenhall, 2004):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kejelasan dari tugas – tugas. Kejelasan dari tujuan organisasi. Patuh dan loyal. Memahami tujuan dari pekerjaan. Pencapaian tujuan. <p>Indikator Kejelasan Tujuan (Chenhall, 2004):</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterampilan kerja. Jenis pelatihan. Pelatihan diberikan dengan jelas. Cara-Cara spesifik. Jenis pelatihan sesuai dengan bidang. Fasilitas pelatihan. Pengembangan kemampuan. <p>Indikator Komitmen Organisasi (Allen & Meyer, 1997):</p> <ol style="list-style-type: none"> Affective commitment. Continuance commitment. Normative commitment. 	Ordinal
2	Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	<p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Bastian, 2010).</p> <p>Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas</p>	<p>Indikator Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencatatan transaksi harus menggunakan bukti yang sah. Posting dari jurnal ke buku besar. Laporan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan realisasi tidak lebih dari 10 hari. Laporan keuangan yang efisien dan efektif. Prosedur keuangan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. 	Ordinal

			<p>nirmassa, maupun media komunikasi personal</p> <p>b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.</p> <p>c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.</p> <p>d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah (Sutedi, 2009:399)</p> <p>(Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010)</p>	
--	--	--	--	--